

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Efektivitas pelaksanaan program merupakan satu komponen kunci untuk mencapai tujuan dan keberhasilan suatu organisasi. Amanat pada pembukaan Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan beberapa tujuan Negara Indonesia, seperti memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sejalan dengan hal ini upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan untuk mencapai kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat. Secara ekonomi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial terjadi baik antar golongan maupun antar wilayah termasuk di daerah pedesaan dan perkotaan, yang perlu mendapat perhatian serius.

Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, pembangunan yang berfokus pada peningkatan perekonomian desa harus menjadi prioritas. Tujuannya adalah untuk memperkuat kemandirian masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Indonesia memiliki berbagai strategi, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga desa, pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya manusia dan lingkungan secara berkelanjutan..

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi dasar hukum bagi desa dalam mengembangkan potensi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang partisipatif dan mandiri. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola secara mandiri oleh desa, dengan bantuan perangkat desa dan masyarakat. Berdasarkan undang-undang ini, diharapkan desa mampu mengelola perekonomian desa secara mandiri. Dalam Undang-Undang Desa disebutkan bahwa modal BUMDes sebagian besar dimiliki oleh desa dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat serta pengurus BUMDes. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa BUMDes dapat meminta pinjaman kepada pihak lain apabila mengalami kesulitan modal usaha. Hal ini

juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur tentang sumber permodalan, pengelolaan, serta tata kelola BUMDes agar lebih profesional dan berkelanjutan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu solusi yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. BUMDes berfungsi sebagai pilar kesejahteraan bangsa karena didirikan atas komitmen bersama masyarakat desa. Usaha ini menekankan prinsip kerjasama, gotong royong, dan penguatan ekonomi masyarakat desa dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran desa. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan BUMDes, ditegaskan bahwa BUMDes diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu dasar, berkembang, maju, dan mandiri. Klasifikasi ini bertujuan untuk memantau perkembangan serta mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja BUMDes agar lebih optimal dalam mendukung perekonomian desa.

Lebih lanjut, dalam Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes, diatur mengenai struktur organisasi, mekanisme kerja, serta tata kelola usaha BUMDes. Peraturan ini memberikan pedoman agar BUMDes dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, serta berbasis kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, BUMDes juga memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan secara berkala sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2022 tentang Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah dalam Badan Usaha Milik Desa.

Pengembangan BUMDes salah satu upaya memperkuat lembaga ekonomi desa sekaligus memanfaatkan berbagai potensi lokal yang tersedia. Selain itu, BUMDes berperan sebagai penggerak utama dalam perekonomian desa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dikelola dengan baik, BUMDes dapat berkontribusi dalam menyalurkan berbagai subsidi

pemerintah, seperti subsidi pupuk, benih, dan lainnya. Selain itu, BUMDes juga dapat berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan hasil produksi yang dihasilkan oleh masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat bekerja sama dengan perbankan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang saat ini dikelola oleh bank-bank pemerintah serta beberapa bank swasta. Selain itu, BUMDes juga berperan sebagai pengelola keuangan inklusif, seperti usaha simpan pinjam, yang jika dikelola dengan efektif, dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan. BUMDes juga dapat berfungsi sebagai wadah untuk pembayaran berbagai layanan seperti air, listrik, dan gas.

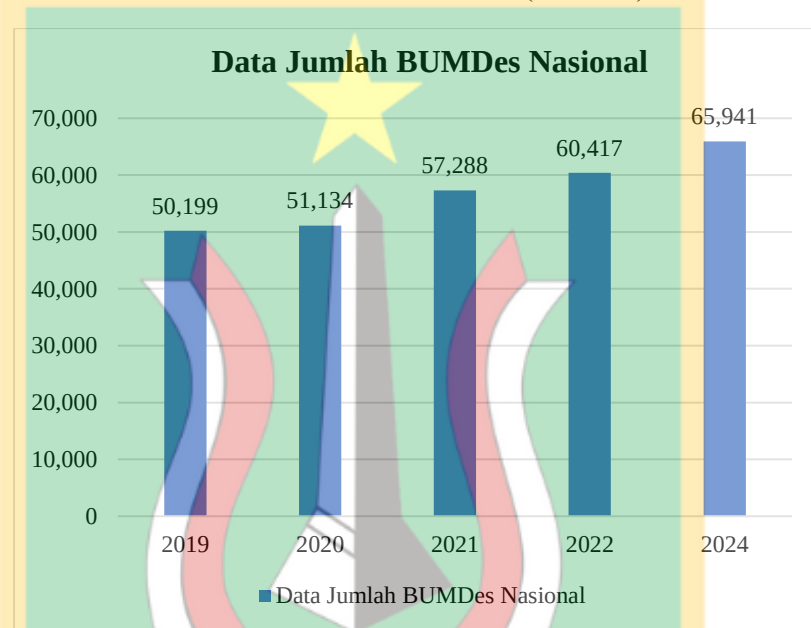
Sebagai lembaga ekonomi masyarakat, BUMDes memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian di pedesaan, sehingga berfungsi sebagai lembaga ekonomi rakyat dan bagian dari landasan demokrasi. BUMDes didirikan dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi desa, mengoptimalkan potensi aset desa, mengembangkan usaha masyarakat, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen utama dalam meningkatkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat. BUMDes berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam menggerakkan perekonomian lokal melalui pengelolaan usaha berbasis potensi desa. Jika pengelolaan BUMDes dilakukan secara optimal, maka desa dapat berkembang menjadi desa mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi desa. Namun, efektivitas BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih menjadi tantangan yang memerlukan kajian lebih lanjut.

Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265 desa, dengan total anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp 71 triliun. Anggaran tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDes sebagai pendorong utama

perekonomian desa. Seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa, jumlah BUMDes terus bertambah, dari 50.199 unit pada tahun 2019 menjadi 65.941 unit pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran pemerintah desa akan peran strategis BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menciptakan peluang usaha bagi masyarakat setempat. (bumdes.kemendesa.go.id).

Tabel 1. 1 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nasional



Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2024, diolah oleh penulis, (2024)

Meskipun BUMDes mengalami pertumbuhan yang pesat, banyak di antaranya menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan efektivitas programnya. Beberapa desa berhasil mengembangkan BUMDes yang produktif dan berkelanjutan, namun tidak sedikit yang tidak berkembang atau bahkan mengalami kegagalan akibat kurangnya perencanaan, rendahnya inovasi, minimnya keterampilan pengelola, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, banyak BUMDes yang masih bergantung pada dana desa tanpa memiliki strategi bisnis yang kuat untuk mencapai kemandirian finansial.

Salah satu fenomena sosial yang sering terjadi adalah kesenjangan antara potensi ekonomi desa dan kemampuan pengelolaan BUMDes. Di beberapa daerah, sektor pertanian, perikanan, atau pariwisata memiliki peluang besar untuk dikembangkan, namun tanpa manajemen yang baik, BUMDes sulit mencapai hasil yang maksimal. Selain itu, rendahnya literasi keuangan dan digital di kalangan pengelola juga menjadi faktor yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan BUMDes di beberapa wilayah.

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras (Kemendes PDTT), meskipun jumlah pendirian BUMDes yang begitu meningkat, masih menghadapi kendala dalam penerapan manajemen. Sebagian BUMDes yang dibangun mengalami mati suri atau tidak berkembang. Hal ini terungkap sebagaimana presiden Joko Widodo pada tahun 2019, mengatakan bahwa sebanyak 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi namun belum berkontribusi terhadap pendapatan desa. Hal tersebut disebabkan karena masih minimnya pemahaman mengenai keberadaan BUMDes pada sebagian besar masyarakat, bahkan pada aparat desa.

Mengutip berita jurnalinspirasi.co.id, (2024), Bogor menjadi salah satu kabupaten yang belum berhasil menerapkan program BUMDes. Dari total 416 desa di kabupaten Bogor, hanya terdapat 85 desa yang berhasil mengelola BUMDes dan sudah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sisanya, terdapat 183 desa yang belum berhasil dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan 148 desa lainnya yang dikatakan gagal dalam mengelola BUMDes.

Mira Dewi Sitanggang selaku Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi oleh BUMDes adalah masalah pemasaran atau strategi marketing yang kurang efektif. Banyak desa yang menghadapi tantangan dalam mengembangkan BUMDes, seperti kurangnya perencanaan yang matang, minimnya inovasi, dan persaingan yang ketat di antara unit usaha.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kecamatan Gunung Putri termasuk salah satu kecamatan berada di Kabupaten Bogor yang memiliki 10 Desa dan 10 BUMDes dengan status BUMDes Aktif dan Pemeringkatan BUMDes Berkembang.

Tabel 1. 2 Status BUMDes Kecamatan Gunung Putri Tahun 2023

No	Nama Desa	Terdapat BUMDes	Status BUMDes	Pemeringkatan BUMDes 2023
1.	Wanaherang	Ada	Aktif	-
2.	Bojong Kulur	Ada	Aktif	Maju
3.	Ciangsana	Ada	Aktif	-
4.	Gunung Putri	Ada	Aktif	-
5.	Bojong Nangka	Ada	Aktif	-
7.	Cicadas	Ada	Aktif	-
8.	Cikeas Udik	Ada	Aktif	-
9.	Nagrak	Ada	Aktif	-
10.	Karanggan	Ada	Aktif	-

Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023, diolah oleh penulis (2024)

Desa Bojongkulur, yang terletak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, memiliki unit usaha ekonomi desa yaitu BUMDes Bojongkulur Teladan Mandiri (BUMDes BTM) dengan status BUMDes maju. BUMDes ini didirikan pada tahun 2015, meskipun relatif baru, BUMDes BTM telah dikenal tidak hanya oleh desa-desa di sekitarnya, tetapi juga oleh desa-desa dari luar kota bahkan luar pulau yang melakukan studi banding, mengingat Desa Bojongkulur merupakan salah satu desa terbaik.

Desa Bojongkulur merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang mempunyai lembaga kesejahteraan BUMDes dengan pemeringkatan BUMDes Maju. Badan Usaha Milik Desa Bojongkulur Teladan Mandiri (BUMDes BTM) merupakan BUMDes milik Desa Bojongkulur yang sudah berdiri sejak tahun 2015. Meskipun masih terbilang baru, BUMDes BTM sudah dikenal tidak hanya desa-desa sekitar, tetapi sudah dikenal juga oleh desa-desa lain diluar kota dan bahkan di luar

pulau yang melakukan studi banding ke Desa Bojongkulur mengingat Desa Bojong Kulur adalah salah satu Desa terbaik.

Unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Bojongkulur Teladan Mandiri (BUMDes BTM) pada saat ini terdapat 4 (empat) unit usaha, yaitu:

1. Unit Usaha Perdagangan (Pasar Desa);
2. Unit Usaha Biro Jasa;
3. Unit Usaha Perikanan, Pertanian dan Peternakan;
4. Unit Usaha Desa Wisata.

Dalam pengembangan BUMDes, Pemerintah Desa Bojongkulur bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan berbagai upaya dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola BUMDes. Dari keberhasilannya BUMDes BTM yang telah berstatus maju, Keberadaan BUMDes Bojongkulur Teladan Mandiri (BUMDes BTM) tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dari keempat unit usaha tersebut. Dalam hal pengelolaan pasar desa, BUMDes Bojongkulur Teladan Mandiri mengalami kesulitan dalam mendorong kesadaran para pedagang dalam membayar biaya sewa kios/lapak/kaki lima tepat waktu dan juga menertibkan pedagang untuk dapat menempati kios sesuai dengan jenis usahanya.

Selain itu, banyaknya kompetitor atau persaingan yang ketat di antara unit usaha, kurangnya sumber daya manusia. Dalam hal usaha perikanan, pertanian, dan peternakan juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan bibit dengan kualitas yang baik dan kondisi cuaca yang mengakibatkan gagal dalam proses perkembangan bibit ikan. Pada usaha desa wisata juga mengalami permasalahan dalam hal sampah masyarakat yang berdatangan karena terbawa arus, datangnya musim penghujan yang menghambat beroperasinya unit usaha desa wisata. Selain itu, BUMDes Bojongkulur Teladan Mandiri (BTM) juga mengalami kendala dalam hal promosi.

Tujuan dan sasaran BUMDes hanya akan dapat tercapai jika pengelolaannya dilakukan dengan baik, terarah, dan profesional. BUMDes memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengoptimalkan potensi desa, yang pada akhirnya dapat membuka peluang ekonomi baru bagi

masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, BUMDes dapat menjadi sumber penciptaan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai kelompok usia, baik generasi muda maupun yang lebih tua, sehingga turut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, meskipun harapannya BUMDes dapat beroperasi secara maksimal dan berkelanjutan, kenyataannya masih banyak tantangan yang dihadapi. Faktor-faktor seperti kesulitan dalam mendorong kesadaran pedagang untuk membayar biaya sewa tepat waktu, banyaknya kompetitor atau persaingan yang ketat di antara unit usaha, kurangnya sumber daya manusia, sulitnya mendapatkan bibit dengan kualitas yang baik dan kondisi cuaca yang mengakibatkan gagal dalam proses perkembangan bibit ikan, sampah masyarakat yang berdatangan karena terbawa arus, dan datangnya musim penghujan yang menghambat beroperasinya unit usaha desa wisata.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis mengenai permasalahan yang telah dijelaskan menjadikan penelitian ini sangatlah penting untuk dilakukan, karena BUMDes merupakan instrumen penting dalam pengembangan ekonomi desa. Penelitian ini penting untuk mengetahui efektivitas BUMDes di Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor sehingga dapat berkontribusi secara maksimal dalam pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa secara keseluruhan. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dijelaskan diatas. Maka untuk memperjelas penyusunan penelitian ini, penulis menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas. Maka tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis efektivitas program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dari “Efektivitas Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor” memberikan beberapa manfaat yang dikategorikan menjadi dua, secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana efektivitas program BUMDes di Desa Bojongkulur dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan meningkatkan pendapatan desa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan atau bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik yang sama, sehingga diharapkan mampu mendorong terciptanya penelitian yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi, wawasan, dan rekomendasi kepada pengelola BUMDes di Desa Bojongkulur dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah desa dalam merencanakan dan pengembangan program BUMDes secara optimal, meningkatkan wawasan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan BUMDes yang baik, serta mendorong peran aktif pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memaksimalkan fungsi BUMDes guna memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan pendapatan desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam laporan penelitian ini, tersusun atas tiga bab, dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan, peneliti memberikan uraian perihal deskripsi secara umum terkait dengan proses menyusun laporan penelitian yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang menggambarkan secara garis besar pokok-pokok penulisan laporan penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab Kajian pustaka, peneliti akan mendeskripsikan beberapa perihal hasil temuan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh seorang peneliti sebelumnya, sebagai bahan rujukan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada Bab II ini juga menjelaskan Penyajian teori yang digunakan untuk penyusunan kerangka teori. Maka dari itu, pada bab ini terdiri dari Tinjauan pustaka atau Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka teori, dan Kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, merupakan bagian mengenai metode atau pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengembangan data dan informasi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Hal tersebut mencakup data dan informasi, pelaksanaan wawancara dan dokumentasi, serta teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian, mencakup lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, menjelaskan dan mendeskripsikan secara rinci temuan hasil analisis data yang sudah diperoleh, serta menjadi titik fokus pada penelitian ini untuk menghasilkan temuan yang akan dijadikan pembahasan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, peneliti merangkum dan menyimpulkan hasil temuan-temuan dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Dan memberikan beberapa saran telah didapat dari hasil observasi tersebut.

